

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

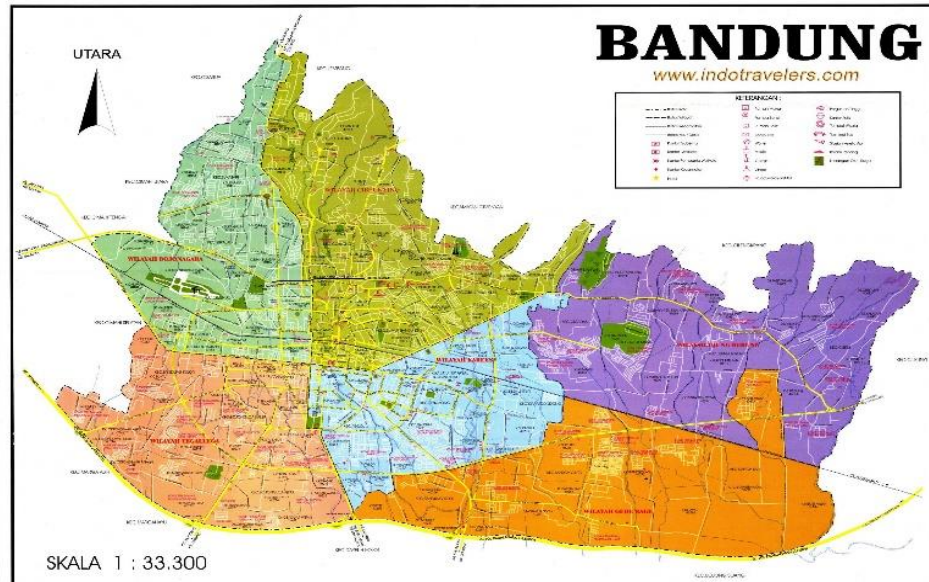
4.1 Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak diantara 107 0 Bujur Timur dan 6 0 55' Lintang Selatan. Secara topografis Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 meter di atas permukaan laut. Di wilayah Kotamadya Bandung bagian Selatan permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian Utara berbukit-bukit sehingga merupakan panorama yang indah. Batas-batas wilayah Kota Bandung sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
2. Sebelah Barat berbatasan jalan Pasteur, Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi
3. Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Cileunyi dan Kabupaten Bandung
4. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang dan Kabupaten Bandung

Gambar 4.1
Peta Kota Bandung



Sumber: Website Pemerintahan Kota Bandung, 2019

Keadaan Geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman Kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan gunung Takuban Perahu. Jenis material di bagian Utara umumnya merupakan jenis andosol, dibagian Selatan serta Timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Di bagian Tengah dan Barat tersebar jenis andosol. Iklim kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk. Pada tahun 1998 temperatur rata-rata 23,5 o C, curah hujan rata-rata 200,4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21,3 hari perbulan.

Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Bojongloa

Kaler, Kecamatan Astana anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Cicadas, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Cicadas, Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Margacinta, Kecamatan Cibiru, dan Kecamatan Antapani.

Visi dan Misi Kota Bandung

Visi Kota Bandung sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Bandung:

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.

Unggul:

Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman:

Terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana

berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera:

Lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Misi Kota Bandung:

1. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Misi Pertama:

Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bandung melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Misi Kedua:

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Bandung yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Misi Ketiga:

Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kota Bandung yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda

dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya.

Misi Keempat:

Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, Meningkatkan ketahanan pangan. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu.

4.1.2 Kecamatan Bojongloa Kaler

Mengacu kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor: 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Keputusan Walikota Bandung Nomor :334 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unit Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Esensi Penyerahan Kewenangan kepada Kecamatan, selain mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab Camat semakin besar, juga tentunya dituntut pula harus adanya penyempurnaan tata aturan dan sistem/prosudur baru yang harus dipahami Camat dalam mengelola fungsi-fungsi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Pendidikan dan Kemasyarakatan,

Ketentraman dan Ketertiban serta Pelayanan masyarakat. Dengan dilaksanakannya pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan, maka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bojongloa Kaler dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Kecamatan.

Di masa depan tugas Pemerintah Kota lebih difokuskan kepada persoalan yang strategis. Sedangkan persoalan teknis kewilayahan, termasuk didalamnya penyelesaian persoalan-persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan oleh Camat. Pemerintah Kecamatan Bojongloa Kaler sebagai bagian Pemerintahan Kota Bandung akan menjadi salah satu penopang dan penyangga dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bandung. Sebagai perangkat daerah, sejak tahun 2003 Kecamatan telah melaksanakan pengelolaan anggaran sendiri dengan menyusun Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kecamatan Bojongloa Kaler, sebagaimana yang berlaku pada unit kerja lainnya di jajaran Pemerintah Kota Bandung.

Hal lainnya yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah kondisi geografis wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler yang terletak di sebelah selatan pusat Kota Bandung, dengan luas wilayah 303,4 Ha. Terdiri atas 5 kelurahan, 47 Rukun Warga, dan 395 Rukun Tetangga. Batas-batas wilayah yang mengelilingi Kecamatan Bojongloa Kaler adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Andir;
2. Sebelah Timur : Kecamatan Bojongloa Kidul dan Kecamatan Astanaanyar;

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Babakan Ciparay;
4. Sebelah Barat : Kecamatan Babakan Ciparay.

Visi dan Misi Kecamatan Bojongloa Kaler

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah: “Mewujudkan Kecamatan Bojongloa Kaler Yang Partisipatif, Berdaya dan Taat Untuk Menunjang Kota Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kemampuan kinerja Aparatur yang handal dan proposional yang menghasil pelayanan yang prima
- 2) Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan. Makna yang terkandung adalah Meningkatkan kinerja pemerintahan Kecamatan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

Kondisi Wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler

Kondisi geografis wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler yang terletak di sebelah selatan pusat Kota Bandung, dengan luas wilayah 303,4 Ha. Terdiri atas 5

Kelurahan 47 RW dan 396 RT. Kecamatan Bojongloa Kaler terdiri dari 5 (lima)

Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Jamika 54 Ha.
2. Kelurahan Babakan Tarogong 54,2 Ha.
3. Kelurahan Babakan Asih 21,2 Ha.
4. Kelurahan Kopo 92 Ha.
5. Kelurahan Suka Asih 92 Ha.

4.1.3 Gambaran Umum Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Kantor Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung (Dinsosnangkis) berlokasi di Jl. Derwati, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40292. Dinsosnangkis merupakan suatu lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

VISI

Kesejahteraan Sosial dari, oleh, dan untuk Masyarakat menuju Bandung yang Bebas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

MISI

1. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi sosial guna memulihkan ketidakberdayaan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya;
3. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Menyediakan data kesejahteraan sosial dan kemiskinan yang berkualitas serta terintegrasi.

Uraian Tugas

1. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Fungsi
 - a. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :
 - b. Perumusan kebijakan teknis lingkup rehabilitasi sosial, perlindungan dan pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, pengendalian, data dan evaluasi
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, pengendalian, data dan evaluasi
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, pengendalian, data dan evaluasi

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang. Fungsi

- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Dinas;
- b. pengoordinasian bahan perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan lingkup rehabilitasi sosial. Fungsi

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)*, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, anak terlantar, anak dengan kebutuhan khusus, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum dan lansia;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup rehabilitasi sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan di lingkup rehabilitasi;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup rehabilitasi sosial;
 - e. pelaksanaan administrasi lingkup rehabilitasi sosial;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan lingkup perlindungan dan pemberdayaan sosial. Fungsi
- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup perlindungan dan pemberdayaan sosial;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perlindungan dan pemberdayaan sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan lingkup perlindungan dan pemberdayaan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perlindungan dan pemberdayaan;
- e. pelaksanaan administrasi lingkup perlindungan dan pemberdayaan sosial;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan lingkup penanggulangan kemiskinan. Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup penanggulangan kemiskinan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup penanggulangan kemiskinan;
- c. pelaksanaan kebijakan lingkup penanggulangan kemiskinan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanggulangan kemiskinan;
- e. pelaksanaan administrasi lingkup penanggulangan kemiskinan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan lingkup pengendalian, data dan evaluasi untuk data PMKS dan PSKS; Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengendalian, data dan evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan lingkup pengendalian, data dan evaluasi;

- c. pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian, data dan evaluasi
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian, data dan evaluasi;
- e. pelaksanaan administrasi lingkup pengendalian, data dan evaluasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

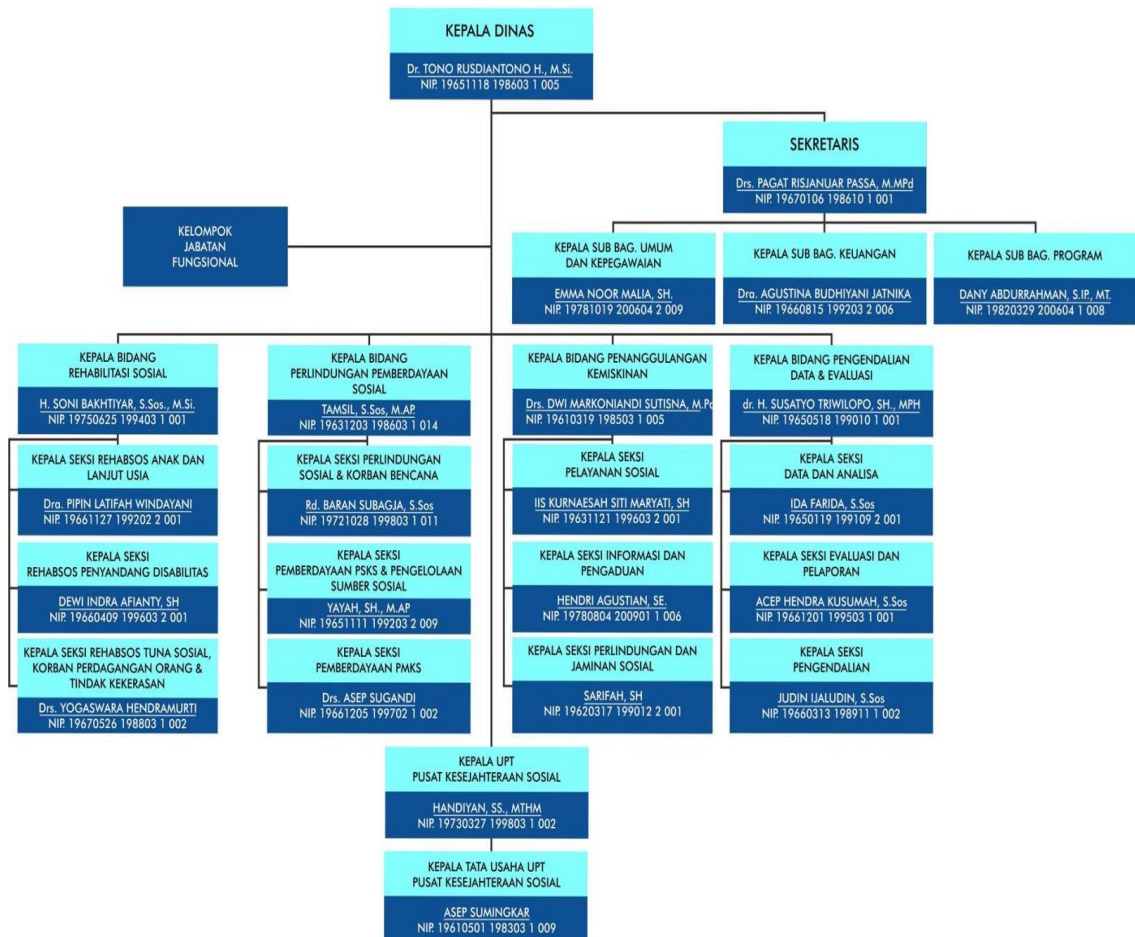
4.1.3.1 Struktur organisasi Dinsosnangkis Kota Bandung

Berdasarkan keputusan Peraturan Walikota No. 1385 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung terdiri atas;

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris yang membawahi:
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub bagian Keuangan
 - c. Sub bagian Program
- 3) Bidang Rehabilitas Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan
- 4) Bidang Perlindungan Pemberdayaan Sosial
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

- b. Seksi Pemberdayaan PSKS dan Pengelolaan Sumber Sosial
 - c. Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 5) Bidang Penanggulangan Kemiskinan
 - a. Seksi Pelayanan Sosial
 - b. Seksi Informan dan Pengaduan
 - c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 6) Bidang Pengendalian Data dan Evaluasi
 - a. Seksi Data dan Analisa
 - b. Seksi Evaluasi dan Program
 - c. Seksi Pengendalian

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Kota Bandung



Sumber: Dinsosnangkis Kota Bandung, 2019

4.1.4 Program Bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan

Bojongloa Kaler

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia (RI) memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai (Ratas tentang Keuangan Inklusif tanggal 26 April 2016). Melalui penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan, diharapkan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

Program bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan program Nasional yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan dibantu oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) dan juga dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di bawah pembinaan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang berperan dalam melakukan pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan. Penerima bantuan pangan non tunai adalah masyarakat miskin atau yang disebut keluarga penerima manfaat.

Dasar Hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 254/ PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK/206 tentang Perubahan Atas Mentreri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
2. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM;
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM;
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan;
5. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs).

Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

2. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT);
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI);
4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
6. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai

Prinsip umum Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM;
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) sesuai dengan preferensi;
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani KPM;
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM.

4.2 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan untuk membuat kelompok lemah atau belum berdaya dengan meningkatkan keberdayaannya melalui upaya pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yang lebih baik. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin terlepas dari sekat ketidakmampuan serta dapat menunjang kualitas hidup masyarakat miskin menjadi lebih baik melalui program bantuan pangan non tunai.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin seringkali mengalami berbagai macam hambatan. Hal ini bisa terjadi karena pihak yang berkepentingan kurang berperan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Selain itu terdapat faktor-faktor penghambat bersifat teknis dan non teknis yang sering muncul.

Sehingga dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Pembahasan akan dilakukan sesuai dengan permasalahan yang peneliti angkat yakni bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.

Menurut Suharto bahwa pemberdayaan dapat dilihat melalui Pendekatan 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat

miskin melalui program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung akan dilakukan analisis berdasarkan Pendekatan Pemberdayaan 5P.

4.2.1 Pendekatan Pemungkinan Program BPNT di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung

Pendekatan pemungkinan yang dilaksanakan di Kecamatan Bojongloa Kaler dalam menciptakan suasana atau iklim yang kondusif sehingga program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat terlaksana dengan maksimal di lingkungan masyarakat miskin. Pemungkinan menjadi hal utama dalam pengembangan potensi program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan pangan non tunai agar dapat tercapainya perubahan yang lebih baik dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan, sehingga masyarakat miskin dapat berdaya.

Agar dapat terlaksana dengan maksimal Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung merupakan sebagai penggerak untuk mencapai perubahan yang diinginkan dan mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat miskin menyesuaikan diri dalam membawa perubahan yang diinginkan melalui program bantuan pangan non tunai agar masyarakat miskin mampu berdaya.

Berdasarkan penelitian dilapangan didapatkan sebuah data dan fakta bahwa dalam pendekatan pemungkinan, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung melalui program bantuan pangan non tunai sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan Program Nasional ini di Kota

Bandung pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial secara Non Tunai.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pelaksana program BPNT di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung belum berhasil menciptakan sebuah suasana atau iklim yang memungkinkan untuk mengentas kemiskinan dikarenakan lingkungan masyarakat yang kurang kondusif.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung sebagai pelaksana dan pendamping Program BPNT melaksanakan program tersebut dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat miskin untuk mengikuti program tersebut, bukan hanya masyarakat miskin saja yang mendapatkan sosialisasi program tersebut, para pelaksana program bantuan pangan non tunai juga mendapatkan informasi mengenai program tersebut.

Pemungkinan suasana atau iklim yang memungkinkan menghambat berjalannya program BPNT, karena akan potensi sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai di Kecamatan Bojongloa Kaler yang merupakan salah satu kawasan dengan jumlah penduduk miskin berdasarkan kartu keluarga (KK) terbanyak di Kota Bandung pada tahun 2018. Oleh karena itu perlunya perhatian Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan sebagai pelaksana program BPNT belum mampu untuk

memungkinkan suasana tersebut berubah menjadi kondusif untuk mengentas kemiskinan

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung melalui pendekatan pemungkinan dapat tercapai apabila beberapa aspek pendekatan dapat terlaksana. Sub indicator pendekatan melalui pemungkinan dijelaskan sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana atau iklim

Presiden Republik Indonesia membuat program Nasional untuk tingkat Kabupaten/Kota menjadi kewenangan daerah untuk mengentas kemiskinan agar masalah kemiskinan dapat teratasi dan masyarakat miskin mampu berdaya. Salah satu program Nasional yang diturunkan ke daerah yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program BPNT ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program bantuan pangan non tunai di Kota Bandung dan dibantu oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan dalam mendampingi program tersebut setiap kecamatan yang menerima program BPNT ini. Salah satu kecamatan yang memiliki jumlah masyarakat miskin terbanyak di Kota Bandung yaitu Kecamatan Bojongloa Kaler.

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat miskin di Kecamatan Bojongloa Kaler bisa berkembang secara optimal dalam mengentas kemiskinan, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah berupaya melalui program tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada

hambatan yang tidak memungkinkan program BPNT berjalan dengan baik yakni dengan adanya suasana atau iklim dari masyarakat miskin Kecamatan Bojongloa Kaler yang tidak masuk kriteria masyarakat miskin dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.

Arti dari suasana merupakan sebuah lingkungan maupun tempat yang lebih kondusif, nyaman dan strategis agar sebuah potensi yang ada dapat berkembang lebih baik. Apabila tercipta sebuah suasana lingkungan dan iklim masyarakat yang baik maka tercipta cara mengentas kemiskinan.

Dengan demikian memungkinkan menyebabkan masyarakat miskin dikategorikan golongan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan karena sumber daya manusia tersebut sulit dijangkau karena alasan ekonomi yang lemah. Maka dari itu perlunya perhatian Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan sebagai pelaksana program BPNT belum berhasil untuk memungkinkan masyarakat miskin penerima bantuan pangan yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk dapat mengentas kemiskinan.

Suasana atau iklim yang memungkinkan potensi sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Bojongloa Kaler yang membuat suasana menjadi lebih kondusif agar program tersebut dapat terlaksana dengan maksimal. Apabila terciptanya suasana atau iklim yang kondusif dalam sebuah lingkungan masyarakat maka program tersebut dapat berjalan dengan maksimal sehingga mengurangi jumlah masyarakat miskin dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Program BPNT yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan Dinsosnangkis Kota Bandung dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan di Kecamatan Bojongloa Kaler dalam mengentas kemiskinan tersebut belum berjalan baik dikarenakan banyak faktor penghambat berjalannya program tersebut, bukan hanya faktor SDM saja faktor yang sangat berdampak terhadap program tersebut ialah faktor penyaluran bantuan serta masalah teknis.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan Dinsosnangkis Kota Bandung yang melaksanakan program bantuan pangan non tunai di tingkat Kota Bandung bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan, jumlah penduduk yang besar apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai maka masyarakatnya tidak akan berdaya. Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan daerah dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak di Kota Bandung dan salah satu Kecamatan yang menerima program bantuan pangan non tunai dengan kondisi sosial ekonomi 25% di daerah pelaksanaan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bojongloa Kaler bahwa masyarakat miskin yang berada di lingkungan Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan tanggungjawab kami agar mereka mampu berdaya dengan menciptakan suasana atau iklim yang kondusif serta masyarakat miskin sejahtera dengan adanya program BPNT tersebut.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan bahwa dalam menciptakan suasana atau iklim masyarakat miskin Kecamatan Bojongloa Kaler dilihat dari sumber daya manusia

yang masih kurang memadai. Karena masih banyaknya masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler yang termasuk kategori kondisi sosial ekonomi yang rendah maka program bantuan pangan non tunai merupakan salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat miskin penerima program bantuan pangan non tunai ini. Masyarakat menanggapi dengan positif dan ada juga negatifnya tergantung bagaimana pelayanan BPNT yang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terima. Pada tahun 2017 dimana awal program berjalan, banyak sekali hambatannya tetapi seiring berjalannya tahun ke tahun program ini dapat mengatasi hambatan dengan perlahan. Dapat disimpulkan bahwa KPM sangat terbantu akan adanya program BPNT walaupun masih ada saja hambatan yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan program BPNT melalui pendekatan pemungkinan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat dapat berkembang secara optimal dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang memungkinkan program BPNT belum terlaksana secara baik, dilihat dari lingkungan tempat tinggal masyarakat miskin Kecamatan Bojongloa Kaler dengan sumber daya manusia yang kurang memadai dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kecamatan Bojongloa Kaler.

2. Menghilangkan sekat struktur dan kultural

Pemberdayaan masyarakat miskin harus mampu menghilangkan sekat struktur dan kultural yang menjadi penghambat suatu program dapat berjalan. Artinya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan suatu program dapat

berjalan dengan kondusif, maka proses pemberdayaan harus mampu menghilangkan sekat kultur dan struktur yang menghambat suatu program berjalan dengan maksimal.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan suatu program yang bertujuan untuk mengentas kemiskinan yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Bojongloa Kaler di bawah pembinaan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang berperan dalam melakukan pendampingan program bantuan pangan non tunai di tingkat Kecamatan. Para keluarga penerima manfaat yang sama kulturnya akan tetapi tidak saling bekerjasama ini yang menjadi penghambat berjalannya program bantuan pangan non tunai apabila mereka tidak saling bekerjasama dalam mengentas kemiskinan.

Sedangkan sekat struktur merupakan batasan antara keluarga penerima manfaat dengan pihak Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Apabila ada batasan yang menyulitkan para keluarga penerima manfaat dalam membutuhkan sebuah bantuan dari pihak Dinas maupun Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, maka potensi ini akan tetap jalan ditempat dan tidak ada sebuah pengembangan yang baik. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung berupaya untuk menghilangkan sekat kultur dan struktur yang dapat menghambat terlaksananya program BPNT dengan cara memberikan komunikasi yang baik terhadap keluarga penerima manfaat. Komunikasi yang baik merupakan bagian yang terpenting dalam menjalin kehidupan bermasyarakat termasuk dalam

menjalankan program pemberdayaan masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah.

Melalui jalinan komunikasi yang baik merupakan langkah yang harus di ambil oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sebagai pelaksana program BPNT di Kota Bandung terhadap masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler. Membina komunikasi yang baik merupakan cara ataupun proses untuk mendukung pemberdayaan, tanpa melihat kultur dan struktur yang ada di masyarakat. Dari komunikasi yang baik akan terbentuk dan menciptakan interaksi antar Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dengan masyarakat miskin di Kecamatan Bojongloa Kaler sebagai salah satu langkah terlaksananya program pemberdayaan oleh pemerintah.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung melakukan sosialisasi dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan program BPNT dan cara mengentas kemiskinan agar masyarakat dapat berdaya. Melalui komunikasi yang baik oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan selaku pendamping program BPNT di Kecamatan Bojongloa Kaler untuk memberikan dampak positif terhadap keluarga penerima manfaat agar bisa memahami segala informasi yang diterima.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, peneliti dapat menganalisis bahwa menghilangkan sekat struktur dan kultural, walaupun sama kultur dapat menghambat proses pemberdayaan, tetapi dengan adanya komunikasi yang baik dan saling bekerjasama. Sedangkan batas struktur antara Tenaga Kerja Sosial Kecamatan dan keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bojongloa Kaler karena

masih berada di lingkungan yang sama jika komunikasi yang baik anatr kedua belah pihak maka sekat struktur tidak menjadi batasan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, peneliti dapat menganalisis sejauh ini untuk menghilangkan batasan antar kultur dirasa berjalan dengan sendirinya, walaupun berbeda-beda antar kultur. Sedangkan batasan struktur antara keluarga penerima manfaat serta Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan di Kecamatan Bojongloa Kaler memang cukup baik dan terus menjalin hubungan yang harmonis agar pelaksanaan program BPNT berjalan lancar.

Peneliti mendapatkan sebuah fakta bahwa upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung untuk menghilangkan sekat struktur maupun kultural dirasa sudah cukup baik. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dijelaskan bahwa langkah Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung untuk membebaskan sekat kultur dan struktur yang menghambat para keluarga penerima manfaat sudah dapat dikatakan cukup baik dengan cara merangkul dan berkomunikasi kepada keluarga penerima manfaat Kecamatan Bojongloa Kaler.

Selain itu agar sekat struktur birokrasi terhadap pemerintah tidak terhambat, maka Dinas begitu terbuka dengan para keluarga penerima manfaat apabila memerlukan bantuan Dinas. Tetapi upaya ini harus di dukung oleh sebuah langkah nyata dari hasil komunikasi dua arah yang dilakukan selama ini bukan sebatas

wacana. Selain itu agar para keluarga penerima manfaat memiliki wadah untuk mengentas kemiskinan

Selain melakukan wawancara dengan aparatur Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, peneliti juga melakukan wawancara dengan Agen Penyalur Bantuan Kecamatan Bojongloa Kaler yang membantu dalam menyalurkan bantuan pangan kepada penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terdapat fakta bahwa komunikasi yang terbentuk belum berjalan dengan maksimal dikarenakan faktor ekonomi yang lemah yakni tradisi yang menyakini mereka bahwa menerima bantuan tiap bulan yang didapat merupakan hal yang baik dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan program BPNT melalui pendekatan pemungkinan melalui indikator menghilangkan sekat kultur dan struktur dilihat dari komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan di Kecamatan Bojongloa Kaler, serta Agen Penyalur bantuan.

Sehingga menghilangkan sekat kultur yang ada dengan cara saling bekerjasama untuk melaksanakan program BPNT agar berjalan dengan baik dan komunikasi yang dilakukan kepada keluarga penerima manfaat sudah berjalan cukup baik karena tidak semua masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler yang memiliki lingkungan yang sama sangat sulit diberikan pengertian dan pengetahuan tentang program BPNT, karena sebagian masyarakat miskin memahami dengan baik. Sehingga komunikasi yang dilakukan sudah berjalan cukup baik.

4.2.2 Pendekatan Penguatan Program BPNT di Kecamatan Bojongloa Kaler

Kota Bandung

Penguatan merupakan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian masyarakat.

Makna dari memperkuat pengetahuan ini sangat erat kaitannya dengan proses memberikan sebuah arahan agar para masyarakat miskin Kecamatan Bojongloa Kaler dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dan dapat memenuhi kebutuhannya.

Pendekatan penguatan harus mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam memperkuat pengetahuan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Bojongloa Kaler tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta memperkuat kemampuan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan dalam memahami materi program BPNT yang harus diberikan kepada masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler. Hal ini dilakukan agar masyarakat miskin menjadi berdaya serta mampu mengentas kemiskinan dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri secara optimal. Pemberdayaan melalui pendekatan penguatan ini harus mampu menciptakan kepercayaan diri dan mengembangkan potensi yang ada agar menunjang kemandirian dan lepas dari kemiskinan. Di bawah ini merupakan sub indikator dari pendekatan penguatan sebagai berikut:

1. Memperkuat Pengetahuan

Memperkuat pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat tentang program BPNT dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat miskin agar dapat mengentas kemiskinan dengan mewujudkan program BPNT untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

Dengan adanya masyarakat mengikuti program yang dijalankan oleh pemerintah, maka mereka turut memberikan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat agar lebih unggul dan mandiri sehingga masyarakat miskin akan mengembangkan potensi secara maksimal dan terlepas dari jerat kemiskinan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh sebuah data bahwa memperkuat pengetahuan keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bojongloa Kaler. Pemberdayaan masyarakat miskin dengan menyampaikan informasi mengenai tujuan dilaksanakannya program BPNT yaitu:

- a. Memberikan pemahaman kepada para masyarakat masyarakat miskin mengenai kebijakan dan Program Bantuan Pangan Non Tunai.
- b. Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program Bantuan Pangan Non Tunai.
- c. Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai

Berikut ini merupakan gambar sosialisasi program BPNT di Kecamatan Bojongloa Kaler pada tahun 2018 sebagai berikut:

Gambar 4.3
Sosialisasi Program BPNT di Kecamatan Bojongloa Kaler



Sumber: Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, 2018

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung untuk memperkuat pengetahuan masyarakat miskin Kecamatan Bojongloa Kaler pentingnya mengentas kemiskinan dan memperkuat pengetahuan tentang program BPNT.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dapat dijelaskan bahwa fakta permasalahan dilapangan kegiatan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat miskin terutama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilatih pengetahuannya agar dapat berdaya. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan

di Kecamatan Bojongloa Kaler juga ikut dalam sosialisasi, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif berdasarkan pengetahuan membangkitkan kesadaran masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bojongloa Kaler, memperkuat pengetahuan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sangat membantu masyarakat miskin dalam memahami proses pelaksanaan program BPNT ini, bukan hanya proses pelaksanaannya saja cara mengentaskan kemiskinan agar masyarakat miskin Kecamatan Bojongloa Kaler mampu berdaya. Sosialisasi yang diberikan bukan hanya kepada masyarakat miskin saja, tetapi para aparat pemerintahan yang terkait dengan program BPNT ini ikut serta dalam sosialisasi.

Serta wawancara dengan agen penyalur bantuan yang ikut serta dalam sosialisasi yang diadakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, agen penyalur dapat mengetahui bagaimana saat kendala teknis saat penyaluran bantuan mengalami hambatan. Ketika hambatan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) error agen penyalur dapat memberitahu kepada pendamping Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan keluarga penerima manfaat, program bantuan pangan non tunai di Kecamatan Bojongloa Kaler memiliki hambatan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan program pemerintah yang diberikan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung untuk mengentaskan kemiskinan agar masyarakat miskin dapat berdaya dan tidak semakin lemah, karena sosialisasi dilakukan yang masyarakat miskin ketahui

sangat jarang dilaksanakan, padahal sosialisasi tersebut sangat membantu keluarga penerima manfaat dalam mendapatkan informasi.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan program BPNT melalui pendekatan penguatan dengan indikator memperkuat pengetahuan dilihat dari pemberian sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sudah berjalan baik, tetapi sosialisasi tersebut jarang dilaksanakan. Sehingga masyarakat berpendapat sosialisasi program tersebut belum berjalan cukup baik.

2. Memperkuat Kemampuan

Memperkuat kemampuan merupakan pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung untuk memperkuat kemampuan keluarga penerima manfaat Kecamatan Bojongloa Kaler secara aktif dan maksimal melakukan sosialisasi tentang program BPNT sehingga masalah-masalah yang bermunculan akan teratasi dengan adanya kemampuan yang dimiliki oleh aparat tersebut dengan memberikan solusi terhadap masalah mengenai berjalannya program BPNT, hambatan yang ada serta meningkatkan kemampuan mereka sendiri dalam menguasai materi tentang program BPNT dan dapat mensosialisasikan kepada keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bojongloa Kaler secara maksimal serta tujuan dari program BPNT dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Bojongloa Kaler.

Terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang bantuan sosial secara non tunai. Pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut untuk memenuhi salah satu fungsi dari

pemerintahan yakni pemberdayaan, yang dimaksud pemberdayaan dalam peraturan di atas ialah pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan pangan non tunai.

Memperkuat kemampuan dilakukan dengan pemberian masteri-materi mengenai program BPNT serta pemberian pelatihan keterampilan kepada keluarga penerima manfaat agar dapat membantu perekonomian keluarga. Memperkuat kemampuan merupakan proses membeikan pelajaran yang berupa mengenai program BPNT dan pemberian latihan kepada kepada keluarga Penerima Manfaat seperti pemberian keterampilan agar dapat bekerja untuk membantu perekonomian keluarga serta dapat menumbuhkembangkan kepercayaan diri keluarga penerima manfaat.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, bahwa pemberian materi mengenai program BPNT serta pelatihan keterampilan berupa memasak, menyetir, menjahit dan lainnya sudah terlaksana dengan baik yang diadakan di tiap kelurahan. Sehingga keluarga penerima manfaat dapat mengasah kemampuannya dengan keterampilan tersebut dengan menunjang kemampuan perekonomian yang lemah menjadi berdaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bojongloa Kaler bahwa keluarga penerima manfaat diberikan pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan agara mereka terlatih mengembangkan potensinya diluar pelatihan untuk bisa memnuhi kebutuhannya.

Serta wawancara dengan keluarga penerima manfaat dengan adanya sosialisasi serta pemberian pelatihan keterampilan ini sangat membantu sekali. Dari hal yang tidak bisa dilakukan sekarang bisa dilakukan dengan adanya keterampilan ini. Keluarga penerima manfaat bisa memenuhi kebutuhannya dengan berjualan makanan. Karena mereka sudah diberikan pelatihan keterampilan.

Upaya memberdayakan masyarakat miskin dengan meningkatkan kepercayaan diri melalui sosialisasi tentang program BPNT serta memberikan pelatihan keterampilan agar mampu mencapai sebuah tujuan pemberdayaan yaitu menjadikan masyarakat yang kurang berdaya menjadi masyarakat yang berdaya. Sehingga masalah yang bermunculan akan teratasi, dengan adanya kemampuan keluarga penerima manfaat tersebut dapat memberikan solusi terhadap masalah mengenai berjalannya program BPNT, hambatan yang ada serta meningkatkan kemampuan mereka sendiri dalam menguasai materi tentang program BPNT serta tujuan dari program BPNT dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler sehingga program ini dapat berjalan lancar.

4.2.3 Pendekatan Perlindungan Program BPNT di Kecamatan Bojongloa

Kaler Kota Bandung

Perlindungan yakni melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan kelompok lemah.

Perlindungan merupakan pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung untuk melindungi masyarakat miskin Kecamatan Bojongloa Kaler agar tidak tertindas oleh kelompok yang lebih kuat. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan pangan non tunai melalui pendekatan perlindungan meliputi dua indikator, yaitu melindungi masyarakat lemah dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang tidak menguntungkan keluarga penerima manfaat.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan program bantuan pangan non tunai di tingkat Kota Bandung. Sebagai pelaksana kegiatan program bantuan pangan non tunai serta Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) harus bisa memberikan pengetahuan program BPNT serta bagaimana cara mengentaskan kemiskinan agar masyarakat berdaya, bukan hanya pengetahuan dan pemahaman saja, keluarga penerima manfaat juga harus diberikan perlindungan agar menghindari terjadinya persaingan tidak seimbang.

Menghapus diskriminasi merupakan bentuk penghapusan tekanan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat agar bisa berkembang secara optimal, upaya yang harus dilakukan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan selaku lembaga pemerintahan di tingkat Kota Bandung dan pendamping Tenaga Kerja Sosial Kecamatan di Kecamatan Bojongloa Kaler harus bisa memberikan

kebebasan bagi keluarga penerima manfaat untuk bisa berkembang secara optimal dan diarahkan menjadi baik tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

1. Melindungi Masyarakat Lemah

Melindungi masyarakat lemah yakni keluarga penerima manfaat Kecamatan Bojongloa Kaler itu sendiri yang dibantu perlindungannya oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung untuk mampu melindungi masyarakat miskin di Kecamatan Bojongloa Kaler khususnya keluarga penerima manfaat agar mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan. Pendekatan perlindungan pemberdayaan ini merupakan hal yang penting dilakukan karena mengingat perlindungan harus diberikan kepada masyarakat miskin yang mengalami masalah ekonomi untuk itu dapat di atasi dengan adanya program pangan non tunai dapat melindungi masyarakat lemah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung selaku pelaksana program Bantuan Pangan Non Tunai memberikan perlindungan berupa pemahaman agar masyarakat miskin dapat mengentaskan kemiskinan dan dapat berdaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bojongloa Kaler bahwa aparat pemerintah tidak akan merugikan masyarakatnya. Karena merupakan tugas pemerintahan agar masyarakat sejahtera dan mampu berdaya. Serta wawancara dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan sebagai pendamping penyaluran bantuan, melihat fakta dilapangan akan menyampaikan kepada pihak yang berwenang jika terjadinya persaingan antara

masyarakat yang menerima bantuan dengan masyarakat yang tidak menerima bantuan.

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan program BPNT melalui pendekatan perlindungan dengan indikator melindungi masyarakat lemah yang dimaksud ialah keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bojongloa kaler untuk dapat melindungi masyarakat miskin tersebut dilaksanakan melalui program BPNT dan pemberian nasehat agar dapat mengentas kemiskinan dan mampu berdaya dirasa belum efektif karena untuk melindungi masyarakat miskin bukan hanya memberikan pemahaman akan tetapi kepada lebih memberikan tindakan untuk bisa mengentas kemiskinan tersebut.

2. Penghapusan Diskriminasi

Penghapusan diskriminasi merupakan upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan selaku pelaksana program BPNT di Kecamatan Bojongloa Kaler untuk menghapus segala bentuk diskriminasi yang membuat masyarakat miskin memiliki kecemburuan sosial. Diskriminasi merupakan sebuah perlakuan atau tindakan yang tidak adil terhadap seseorang atau sekelompok orang.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam penghapusan diskriminasi yakni sebuah upaya untuk mengatasi kecemburuan sosial terhadap keluarga penerima manfaat dengan masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam penerima bantuan pangan non tunai ini dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan di Kecamatan Bojongloa Kaler, didapatkan sebuah data dan fakta. Adanya kecemburuan sosial dari masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam penerimaan program bantuan pangan non tunai, padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan tidak bisa bertindak untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, karena hanya sebagai pendamping Kecamatan Bojongloa Kaler dalam mendampingi penyaluran bantuan pangan non tunai kepada masyarakat keluarga penerima manfaat.

Permasalahan yang timbul ini bukanlah suatu perlindungan bagi masyarakat miskin karena mereka merasa dalam ketidakberdayaan ekonomi lemah dan tidak termasuk kedalam salah satu penerima bantuan pangan ini. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan di Kecamatan Bojongloa Kaler hanya bisa mendengarkan keluhan yang masyarakat miskin katakan dan akan disampaikan kembali kepada atasan yang lebih mengetahui bagaimana cara mengantisipasi permasalahan tersebut.

Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan permasalahan tersebut dalam penghapusan diskriminasi yakni sebuah upaya untuk dapat mengatasi kecemburuan sosial dari keluhan masyarakat miskin yang disampaikan oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan di Kecamatan Bojongloa Kaler. Di tindak lanjuti oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung bahwa data masyarakat miskin yang termasuk kedalam keluarga penerima manfaat di data dan diproses oleh pusat.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan program BPNT melalui pendekatan perlindungan dengan indikator penghapusan diskriminasi yakni karena adanya

kecemburuan sosial masyarakat miskin yang tidak berhak malah dapat bantuan. Program ini belum berjalan maksimal di Kecamatan Bojongloa Kaler.

4.2.4 Pendekatan Penyokongan Program BPNT di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung

Penyokongan yakni memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peran-peran dan tugas kehidupan. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan pangan non tunai di Kecamatan Bojongloa Kaler dengan menggunakan pendekatan penyokongan merupakan upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung serta pendamping Tenaga Kerja Sosial Kecamatan di Kecamatan Bojongloa Kaler untuk memberikan bimbingan dan dukungan agar keluarga penerima manfaat tidak terjatuh semakin lemah dan bisa mengembangkan potensi secara optimal.

Pemberdayaan melalui pendekatan penyokongan dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat miskin cukup baik. Upaya Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam memberikan dukungan bimbingan dan arahan agar masyarakat dapat berkembang sampai saat ini melalui bimbingan yang berupa sosialisasi program BPNT serta pentingnya mengentas kemiskinan merupakan sebuah pembangunan yang bermula tidak berdaya menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.

Dinas sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung serta Tenaga Kerja Sosial Kecamatan di Kecamatan Bojongloa Kaler memberikan dukungan kepada masyarakat miskin khususnya Keluarga Penerima Manfaat untuk bisa mengentas kemiskinan. Sebuah dukungan yang baik maka akan berdampak pada hasil yang baik pula dengan adanya dukungan untuk memfasilitasi program bantuan pangan non tunai dan kemudahan untuk melaksanakan sosialisasi program BPNT maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sejalan ini Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung memberikan dukungan untuk masyarakat miskin di Kecamatan Bojongloa Kaler melalui pemberian bimbingan yang jarang dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi.

1. Memberikan Bimbingan

Pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan pangan non tunai melalui aspek bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan di Kecamatan Bojongloa Kaler. Memberikan bimbingan merupakan upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dengan cara sosialisasi pentingnya mengentas kemiskinan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung pemberian bimbingan Dinas hanya memberikan sosialisasi serta bimbingan kepada keluarga penerima manfaat

Bukan hanya keluarga penerima manfaat saja diberi bimbingan, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan diberi bimbingan agar bisa mengayomi keluarga penerima manfaat karena mereka merupakan pendamping tiap bulan yang bertemu dengan keluarga penerima manfaat saat penyaluran bantuan dibagi, maka dari itu Tenaga Kerja Sosial Kecamatan memberikan dukungan agar keluarga penerima manfaat bisa menjalankan peranan dan kehidupannya sehari-hari.

Pemberian bimbingan dilakukan kepada masyarakat melalui program bantuan pangan non tunai dengan begitu keluarga penerima manfaat telah mengetahui cara mengentas kemiskinan sesuai dengan peraturan pemerintah. Untuk dapat memberdayakan masyarakat dengan program bantuan pangan non tunai yang salah satu pemenuhan tugas serta fungsi dari pemerintah yakni pemberdayaan. Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan program bantuan pangan non tunai melalui pendekatan penyokong dengan indikator memberikan bimbingan kepada masyarakat miskin dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi serta dukungan sudah berjalan dengan baik sehingga program BPNT dapat terlaksana di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.

2. Memberikan Dukungan

Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan pangan non tunai yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Bojongloa Kaler dalam memberikan sebuah dukungan agar keluarga penerima manfaat Kecamatan Bojongloa Kaler berpartisipasi dalam sosialisasi program bantuan pangan non tunai

dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan agar mampu berdaya.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang salah satu fungsi dari pemerintahan yakni fungsi pemberdayaan, maka dari itulah program tersebut dibuat untuk memberdayakan dan memberikan dukungan kepada keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bojongloa Kaler. Dalam melaksanakan program bantuan pangan non tunai di Kecamatan Bojongloa Kaler yang melaksanakan program tersebut di bantu Tenaga Kerja Sosial Kecamatan dan Agen Penyalur bantuan pangan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Bojongloa Kaler yang di dampingi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dimana mereka memberikan penyuluhan serta pengetahuan tentang mengentas kemiskinan serta mengenai hal program bantuan pangan non tunai untuk menjunjukkan dukungan kepada keluarga penerima manfaat untuk mengentas kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Bojongloa Kaler dapat dipahami bahwa, masyarakat miskin di Kecamatan Bojongloa Kaler ini sudah berusaha untuk mencoba mengentas kemiskinan dan berusaha untuk tidak mengandalkan bantuan yang diterima berupa beras tiap bulannya, karena kondisi ekonomi yang lemah dan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup agar tidak semakin terpinggirkan.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan program BPNT melalui pendekatan penyokongan dengan indikator memberikan dukungan kepada masyarakat miskin

dengan cara memberikan motivasi agar tidak terpuruk dengan kondisi ekonomi yang semakin lemah. Kecamatan Bojongloa Kaler belum berjalan dengan baik, karena masih adanya masyarakat yang mendukung dan menentang program BPNT.

4.2.5 Pendekatan Pemeliharaan Program BPNT di Kecamatan Bojongloa

Kaler Kota Bandung

Pemeliharaan yakni memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan kesimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan pangan non tunai dilihat dari pendekatan pemeliharaan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) untuk memelihara kondisi yang tetap kondusif agar masyarakat miskin dapat melanjutkan kehidupan yang diinginkannya dan tidak terpuruk dalam kondisi semakin lemah. Pemberdayaan melalui pendekatan pemeliharaan ini meliputi indikator memelihara kondisi yang kondusif dan pembinaan.

Memelihara kondisi yang kondusif merupakan pendekatan yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program Bantuan Pangan Non Tunai untuk mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Bojongloa Kaler. Program Bantuan Pangan Non Tunai ditetapkan Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang bantuan sosial secara non tunai Sudah menjadi tugas

pemerintah memberikan pemberdayaan kepada masyarakat karena sesuai dengan fungsi pemerintah yang salah satunya memberikan pemberdayaan untuk masyarakatnya sebab dari itulah program Bantuan Pangan Non Tunai agar mengentas kemiskinan dan menjadikan masyarakat mandiri serta menjalani hidup yang berkualitas.

Pembinaan merupakan upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung untuk melaksanakan program bantuan pangan non tunai di Kecamatan Bojongloa Kaler dibantu oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Bojongloa Kaler dalam pemberian pembinaan diharapkan masyarakat dapat mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

1. Memelihara Kondisi yang Kondusif

Memelihara kondisi yang kondusif merupakan aspek pemberdayaan agar tetap seimbang antara keluarga penerima manfaat Kecamatan Bojongloa Kaler dengan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung agar dapat meningkatkan kualitas masyarakat miskin agar tidak semakin terpuruk dalam kondisi yang lemah, serta memelihara kondisi masyarakat miskin Kecamatan Bojongloa Kaler agar tidak tertekan dengan program bantuan pangan non tunai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah melakukan upaya pendekatan pemeliharaan dengan memelihara kondisi yang kondusif terhadap keluarga penerima manfaat dan memberikan pemahaman tentang program bantuan pangan non tunai. Sehingga mereka bisa berusaha untuk tidak terpuruk dengan kondisi ekonomi yang semakin

lemah, dalam pemberian pemahaman ini Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung berusaha agar masyarakat miskin dapat berdaya.

Menciptakan lingkungan yang kondusif memungkinkan program BPNT terlaksana di Kecamatan Bojongloa Kaler memiliki banyak penghambat salah satunya faktor lingkungan masyarakat itu sendiri yang memungkinkan adanya kecemburuan sosial. Dapat di simpulkan bahwa untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dapat dilihat dari masyarakat miskin yang menerima program bantuan pangan non tunai. Program ini sangat membantu masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan di Kecamatan Bojongloa Kaler.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan program BPNT melalui pendekatan pemeliharaan dengan memelihara kondisi yang kondusif agar program tersebut tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat miskin di Kecamatan Bojongloa Kaler yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta Tenaga Kerja Sosial Kecamatan program BPNT di Kecamatan Bojongloa Kaler dalam memberikan bimbingan serta pemahaman tentang program BPNT untuk memelihara lingkungan yang kondusif sehingga program BPNT dapat diterima baik oleh masyarakat, sudah cukup berjalan dengan baik dan di terima oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Bojongloa Kaler tersebut.

2. Memelihara Keselarasan

Dalam aspek pendekatan memelihara keselarasan, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung merasa sudah terjadi sebuah keselarasan antara masyarakat penerima BPNT.

Dari hasil penelitian, peneliti dapat mengamati bahwa keluarga penerima manfaat memang terlihat saling harmonis. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) tidak terlihat saling menjatuhkan apalagi mempersulit dalam proses penyaluran bantuan pangan non tunai. Dalam hal ini terlihat bahwa para keluarga penerima manfaat Kecamatan Bojongloa Kaler masih bisa menjaga keselarasan kehidupan bermasyarakat dengan sendirinya.

Dengan adanya sebuah keselarasan yang terus dibangun, maka untuk memelihara suasana persaingan yang tetap kondusif pun akan terus terjaga. Dari hasil uraian pembahasan mengenai aspek pemberdayaan melalui pendekatan pemeliharaan. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung untuk tetap memelihara sebuah suasana yang kondusif diharapkan tetap adanya sebuah langkah yang nyata untuk terus mengembangkan Program bantuan pangan non tunai. Sedangkan sebuah keselarasan yang sudah dibangun oleh Pemerintah harus terus dijaga.

Program-program maupun kegiatan yang dilakukan Pemerintah diharapkan dilakukan secara merata. Agar tidak ada sebuah kecemburuan sosial antara para masyarakat miskin satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan keselarasan para penerima bantuan menjadi tidak baik.